PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT DIDAERAH AREA PERTAMBANGAN

Oleh :

Ulfa Hasanah

Dosen Bagian Perdata Fakutlas Hukum Universitas Riau

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat meliputi: Pra Penambangan; masyarakat diberi akses luas terkait negosiasi harga lahan yang akan dilakukan ganti rugi, terhadap lahan masyarakat yang telah diganti rugi, PT Bukit Asam masih memberikan hak mengelolah lahan kepada masyarakat sampai batas waktu untuk penambangan dilakukan, Operasional; terkait segala ketentuan hukum melekat didalamnya, meliputi aspek lingkungan, atau kenyamanan masyarakat terhadap tingkat kebisingan maupun getaran tinggi akibat ekses penambangan, Pasca penambangan; hal ini terkait reklamasi setelah penambangan berakhir sesuai izin yang berlaku. Selain itu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mencakup, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup, dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN, PT Bukit Asam memiliki tanggung jawab sosial terkait dengan masyarakat sekitar tambang melalui program CSR terkait pemeliharaan lingkungan hidup melalui program kemitraan bina lingkungan.

Abstract

Legal protection of the rights of the community include: Pre Mining; the public is given broad access related land price negotiations to be conducted compensation, to the community lands have been compensated, PT Bukit Asam still gives the right to manage the land to the community for a time limit to mining operations; related to any provisions of law are inherent in it, covering aspects of the environment, or the convenience of the public against high noise levels and vibration due to excess mining, post-mining; this is related to reclamation after mining ends appropriate permissions apply. In addition, based on Law Number 32 Year 2009 regarding the Environment which include, management, protection, and preservation of the environment, and the Regulation of the Minister of State Enterprises No. PER-05 / MBU / 2007 on SOE Partnership Program, PT Bukit Asam has a social responsibility associated with communities around the mine through CSR programs related to preserving the environment through community development partnerships program.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Hak-hak Masyarakat, Area pertambangan*

A. Pendahuluan

Wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam

wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan yang maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang merupakan hubungan yang bersifat abadi. Tanah adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap umat manusia yang ada di muka bumi.

Di lain pihak ada masyarakat yang menganut pola tradisional, dimana masyarakat adat menganggap mereka telah memperoleh hak tersebut jauh sebelum negara mengklaim penguasaannya. Hak ini biasanya kita kenal dengan hak ulayat dan Tanah ulayat. Kedua aspek inilah yang sebenarnya menjadi pemicu munculnya sengketa pertanahan, yang kecenderungan sebagian besar merugikan masyarakat adat. Salah satu kegiatan yang membutuhkan lahan adalah kegiatan pertambangan. Untuk dapat melakukan usaha pertambangan dibutuhkan tanah karena kegiatan penambangan tidak lain adalah melakukan penggalian tanah. Keberadaan tambang sebagian besar letaknya berada di dalam perut bumi. Sebuah perusahaan pertambangan untuk dapat melakukan penambangan harus memiliki izin dari pemerintah terlebih dahulu.

Dengan izin yang dimilikinya perusahaan pertambangan tidak dapat langsung melakukan penambangan sesuai lokasi yang ditunjuk dalam izin bersangkutan akan tetapi perlu melihat dahulu di lokasi penambangan, apakah di lokasi tersebut terdapat hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain. Apabila ada hak-hak atas tanah maka tidak mungkin kegiatan penambangan dapat dilakukan begitu saja, karena perusahaan pertambangan akan menghadapi masalah yaitu benturan kepentingan antara penggunaan hak atas tanah dengan penggunaan hak penambangan pada bidang tanah yang sama. Sementara itu pada umumnya hak atas tanah lebih dahulu diberikan pemerintah dibandingkan dengan hak penambangan. Area atau

lokasi suatu tambang terkadang ada yang ditanah milik pribadi warga masyarakat dan juga ada yang berada disuatu lingkungan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Terhadap lokasi penambangan yang berada ditanah masyarakat adat ini yang perlu perlindungan hukum agar hak-hak masyarakat adat didaerah tersebut tetap terjaga dan lokasi tanah ulayat ini tidak hilang.

Sebidang tanah merupakan bagian dari bumi yang letaknya berada pada bidang hukum agrarian. Hukum agraria ruang lingkupnya sangat luas karena objek yang diatur adalah mengenai bumi, air dan ruang angkasa, berasal dari karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekayaan nasional yang mempunyai fungsi sangat penting yaitu untuk membangun kemakmuran masyarakat Indonesia.

Dengan demikian diperlukannya akses terhadap keadilan terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat dan hak-hak masyarakat adat sebagai efek dari kegiatan pertambangan, pemerintah harus dapat menjamin kepentingan masyarakat adat terwakili selama proses kegiatan berlangsung dari awal sampai akhir agar kemakmuran rakyat sebagai mana diamanah kan UUD 1945 dapat direalisasikan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai proses penyediaan lahan bagi usaha pertambangan dan posisi masyarakat dalam perjanjian kerjasama pertambangan, peralihan hak, dan perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat selama proses perjanjian berlangsung, dengan penelitian berjudul, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT DI DAERAH AREA PERTAMBANGAN.** (Studi Kasus: Kecamatan Peranap – Indragiri Hulu)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyediaan lahan dan peralihan hak, terkait kerjasama pertambangan di kecamatan Peranap?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat terkait dengan lingkungan disekitar area usaha pertambangan?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah *yuridis sosiologis* (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Kec. Peranap, Muspida Kecamatan Peranap dan Batang Peranap, Pihak Perusahaan Terkait yang berada dilingkungan Kecamatan Peranap.

D. Pembahasan

1. Proses Penyediaan Lahan Dan Peralihan Hak atas tanah dalam Pengelolaan Pertambangan

Penyediaan Lahan adalah pengambialihan tanah yaitu suatu proses/kegiatan perolehan tanah yang bertujuan untuk kepentingan publik baik yang digunakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 9 menyatakan :

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil

Pasal 10 menyatakan :

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;

- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Penyediaan lahan untuk pertambangan tidak termasuk pada pengertian kepentingan umum yang dimaksudkan dalam UU No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka prosesnya dapat dilakukan dengan jual beli, tukar menukar sebagaimana cara pengalihan tanah dilakukan.

Sedangkan dalam pengalihan hak atas tanah, yang dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Dengan demikian setiap pengalihan hak milik atas tanah, yang dilakukan dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah harus dibuat di hadapan PPAT. Jual beli, tukar menukar atau hibah ini dalam konsepsi hukum adat adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat terang dan

tunai. Dengan terang dimaksudkan bahwa perbuatan hukum tersebut harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang menyaksikan dilaksanakan atau dibuatnya perbuatan hukum tersebut.

Sedangkan dengan tunai diartikan bahwa dengan selesainya perbuatan hukum dihadapan PPAT berarti pula selesainya tindakan hukum yang dilakukan dengan segala akibat hukumnya. Ini berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat dibatalkan kembali, kecuali terdapat cacat cela secara substansi mengenai hak atas tanah (hakmilik) yang dialihkan tersebut, atau cacat mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak atas bidang tanah tersebut.

Adapun yang menjadi syarat-syarat terjadinya pengalihan terhadap kebendaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengalihan tersebut haruslah dilakukan oleh orang yang berhak untuk mengalihkan kebendaan tersebut.

Tidak selamanya pemilik suatu kebendaan dapat diberikan hak untuk mengalihkan benda tersebut, hal ini dikarenakan suatu hal misalnya saja pemilik suatu kebendaan di dalam keadaan pailit (*failiet*). Disini ia merupakan pemilik suatu kebendaan tetapi dikarenakan keputusan pengadilan yang mengatakan ia pailit maka ia tidak berhak untuk mengalihkan benda tersebut.

Adapun sebaliknya orang tersebut tidak merupakan pemilik suatu kebendaan tetapi ia berhak untuk melakukan pengalihan. Misalnya pandamer, di mana pihak ini menerima barang gadaian dari pemilik benda tersebut sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Dalam hal ini ia tidak merupakan pemilik yang sah dari suatu kebendaan, tetapi bila pihak yang berhutang dalam hal ini pemilik yang sah dari benda itu ingkar janji atau wanprestasi maka pihak penerima gadai dapat mengalihkan benda tersebut.

b. Pengalihan itu dilakukan secara nyata.

Artinya pengalihan itu harus benar-benar terjadi dan dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan. Melihat persyaratan tersebut di atas pengalihan terhadap benda-benda bergerak cukup hanya melakukan penyerahannya begitu saja, tetapi terhadap benda tidak bergerak, pencatatan benda tersebut ke dalam suatu akte sangat penting untuk menetapkan keabsahan benda tersebut. Terhadap benda tidak bergerak, di samping dengan pengalihan nyata, maka untuk mengalihkan hak milik atas barang tidak bergerak tersebut harus dilakukan dengan pengalihan secara yuridis.

c. Pengalihan yuridis adalah berupa pencatatan dalam perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas benda tidak bergerak tersebut dalam suatu akte yang otentik di depan Para pejabat yang berwenang dan kemudian mendaftarkannya dalam register umum yang telah disediakan khusus.

Pengalihan hak atas tanah dapat terjadi dikarenakan:

1) Pewarisan tanpa wasiat

Menurut hukum perdata, jika pemegang sesuatu hak atas tanah meninggal dunia, hak tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya. Pengalihan tersebut kepada ahli waris, yaitu siapa-siapa yang termasuk ahli waris, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya, diatur oleh Hukum Waris almarhum pemegang hak yang bersangkutan, bukan oleh Hukum Tanah. Hukum tanah memberikan ketentuan mengenai penguasaan tanah yang berasal dari warisan dan hal-hal mengenai pemberian surat tanda bukti pemilikannya oleh para ahli waris. Menurut ketentuan Pasal 61 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, untuk pendaftaran pengalihan hak karena pewarisan yang

diajukan dalam waktu enam bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya.

2) Pemindahan hak

Berbeda dengan beralihnya hak atas tanah karena pewarisan tanpa wasiat yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pemegang hak, dalam perbuatan hukum pemindahan hak, hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya bisa dikarenakan: Jual-Beli, Hibah, pemasukan dalam perusahaan atau “inbreng” dan Hibah-wasiat atau “*legaat*”

Perbuatan-perbuatan tersebut, dilakukan pada waktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai atau langsung, kecuali hibah wasiat. Artinya, bahwa dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain. Dalam hibah wasiat, hak atas tanah yang bersangkutan beralih kepada penerima wasiat pada saat pemegang haknya meninggal dunia.

Jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemberian menurut adat dan pemasukan dalam perusahaan, demikian juga pelaksanaan hibah-wasiat, dilakukan oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disingkat PPAT, yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan di hadapan PPAT, telah dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum yang “gelap”, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi).

Akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan secara nyata atau “riil” perbuatan hukum jual-beli yang dilakukan. Dengan demikian sifat jual-beli, yaitu tunai, terang dan riil, dipenuhi. Akta tersebut membuktikan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara implisit juga membuktikan, bahwa penerima

hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru. Tetapi hal itu baru diketahui oleh dan karenanya juga baru mengikat para pihak dan ahliwarisnya karena administrasi PPAT sifatnya tertutup bagi umum.

Untuk memperoleh surat bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya pembuktiannya pemindahan haknya didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota/Kotamadya, untuk dicatat pada buku tanah dan sertifikat yang bersangkutan. Dengan dicatatnya pemindahan hak tersebut pada sertifikat haknya, diperoleh surat tanda bukti yang kuat. Karena administrasi pengalihan hak atas tanah yang ada di kantor pertanahan Kota/Kotamadya mempunyai sifat terbuka bagi umum, maka dengan dicatatnya pemindahan hak tersebut pada buku tanah haknya, bukan hanya yang memindahkan hak dan ahliwarisnya, tetapi pihak ketiga pun dianggap mengetahui, bahwa penerima hak adalah pemegang haknya yang baru.¹

2. Mekanisme Pengalihan Hak Atas Tanah

Pengalihan hak atas tanah, dan khususnya hak milik atas tanah tersebut dapat terselenggara secara benar, maka seorang PPAT yang akan membuat pengalihan hak atas tanah harus memastikan kebenaran mengenai hak atas tanah (hak milik) tersebut, dan mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka yang akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah tersebut. Sehubungan dengan obyek hak atas tanah yang dipindahkan PPAT harus memeriksa kebenaran dari dokumen-dokumen:

- a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, sertifikat asli hak yang bersangkutan. Dalam hal sertifikat tidak diserahkan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1. Cetakan ke-9. (Jakarta: Djambatan, 2003), Hlm. 329.

b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar:

- 1) Surat bukti yang membuktikan hak atas tanah yang lama yang belum dikonversi atau surat keterangan Kepala Desa/ Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut dengan itikad baik, dan tidak pernah ada permasalahan yang timbul sehubungan dengan penguasaan tanahnya tersebut; dan
- 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan; dan dalam hal surat tersebut tidak dapat diserahkan maka PPAT wajib menolak membuat akta pemindahan hak atas tanah tersebut termasuk hak milik atas tanah yang akan dialihkan tersebut.

Apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan tanahnya baik berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya, maka pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik tanah, dengan syarat:

- 1) Telah dikuasai selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya.
- 2) Penguasaan dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka.
- 3) Diperkuat dengan kesaksian orang yang dapat dipercaya.
- 4) Penguasaan tidak dipermasalahkan atau tidak dalam keadaan sengketa.²

² Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2010. Hlm. 144

3. Proses penyediaan lahan dan peralihan lahan untuk kegiatan pertambangan di Kecamatan Peranap

Propinsi Riau memiliki potensi sumber daya energi yang luar biasa dan melimpah. Salah satu potensi yakni adanya kandungan batubara di Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Rokan Hulu.³ Di kabupaten Indragiri Hulu potensi batubara terdapat di Kecamatan Peranap dan Kecamatan Batang Peranap. Studi kelayakan oleh LPM-ITB dilakukan tahun 1999. PT. Bukit Asam secara resmi beroperasi di Peranap kabupaten Indragiri Hulu Riau setelah memenuhi persyaratan dalam pengelolaan Wilayah Pertambangan. Adapun landasan operasionalnya adalah Dokumen AMDAL penambangan batubara daerah Peranap No. 1758/28/SJN-R/2001, tanggal 04 Mei 2001 yang disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Dokumen lainnya yaitu Izin usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi berdasarkan SK Bupati INHU No. 02.K/IUP/Distamben-03/VI/2005 tentang pemberian kuasa penambangan kepada PT.BUKIT Asam Tbk.

Sumber daya batubara di kawasan pertambangan Peranap ini diprediksi mencapai 792 juta ton, dengan cadangan tertambang 367 juta ton dan dapat memasok, hasil tambang selama 40 tahun. Dengan kapasitas sebesar itu sudah dapat dipastikan akan membutuhkan lahan masyarakat yang akan dijadikan areal produksi tambang PT.Bukit Asam di Peranap. Untuk pelaksanaan kegiatan ini maka PT.Bukit Asam mengirim perwakilan ke Peranap untuk melakukan survey terkait lahan yang akan dijadikan proyek penambangan didampingi oleh pemerintah setempat, pemilik hak, dan instansi terkait, survei ini meliputi;⁴

- a. Identitas pemegang hak atas tanah
- b. Status tanah

³ Data Distamben Riau Tahun 2008

⁴ Wawancara dengan Bapak Anggiat. S, Kepala Proyek PTBA wilayah Peranap – INHU, Senin, 27 Oktober 2014

- c. Luas tanah
- d. Batas tanah
- e. Letak Tanah
- f. Benda-benda diatas tanah

Dilokasi rencana penambangan Tim melakukan diskusi dengan warga terkait dengan rencana penambangan, lokasi yang digunakan dan perencanaan penggunaan lahan masyarakat sebagai area pertambangan dan ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang terkena lokasi penambangan. Setelah survey dilakukan, maka diadakan musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah setempat atau pun tokoh masyarakat. Musyawarah ini terkait kompensasi yang akan diterima pemilik hak. Status tanah dari masyarakat adalah tanah Hak Milik.⁵

Dari sekian lama penjajakan yang dilakukan, dari total lahan area tambang 18.230 hektare, baru 400 hektare yang berhasil di sepakati dengan pemilik hak untuk dilakukan ganti rugi sesuai harga yang di sepakati. Ganti rugi tidak hanya terhadap tanah-tanah yang bersangkutan, tetapi juga terhadap benda-benda yang ada diatasnya, seperti tanaman, bangunan dan lainnya. Terhadap tanah yang belum diserahkan oleh masyarakat kepada PT. Bukit Asam masih diupayakan melalui upaya mediasi yang dilakukan dengan bantuan aparat pemerintah setempat secara berjenjang, dan dibantu tokoh masyarakat yang ada, untuk mencari mekanisme yang cocok untuk penyelesaian pembebasan lahan.⁶

Setelah kesepakatan tercapai maka dilakukan pemberian kompensasi berupa ganti rugi sesuai yang di sepakati, dimana PTBA memberikan dana kompensasi, dan pemilik hak menandatangani Akta pelepasan hak dengan dihadiri oleh saksi-saksi dari pemerintah setempat, untuk selanjutnya dilakukan sertifikasi terhadap hak atas tanah. Masih banyaknya lahan milik

⁵ Wawancara dengan Ismardjoyo, tokoh Masyarakat Desa Semelinang Tebing, Tanggal 27 Oktober 2014.

⁶ *Ibid.*

masyarakat yang belum dibebaskan atau belum di sepakati untuk ganti rugi disebabkan beberapa hal, diantaranya:⁷

- 1) Nilai kompensasi yang tidak layak menurut pemilik hak
- 2) Adanya keinginan untuk bagi hasil dan tukar lahan
- 3) Pemilik hak tidak ada niat melepas hak nya
- 4) Faktor pengetahuan dan faktor ajakan
- 5) Faktor lain yang susah di prediksi

Berdasarkan IUP Operasi Produksi KW.96PP0289 berdasarkan SK Bupati Indragiri Hulu No.09/IUP/545-02/IV/2010 tentang Penyesuaian izin kuasa pertambangan eksploitasi menjadi izin usaha pertambangan Operasi Produksi maka PT. Bukit Asam memulai proyek kelola tambang di Peranap Tahun 2010. Terkait dengan penyediaan lahan maka pembebasan lahan yang akan digunakan untuk wilayah mulai dilakukan pada tahun 2010 sampai sekarang. Pertambangan di Peranap berada di bawah kendali PT. Bukit Asam Metana Peranap yang merupakan anak perusahaan Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dari PT.Bukit Asam Tbk. Wilayah tambangnya meliputi berupa daerah perbukitan dengan luas 18.230 hektar, di mulut tambang direncanakan akan dibuka PLTU berkapasitas 2 x 300 MW, saat ini PT. Bukit Asam Metana Peranap masih memproduksi diangka 500 ribu ton pertahun dengan standar BA 53 (53.000 kilo kalori/gram) cocok untuk bahan bakar *methanol* dan SNG yang akan ditingkatkan lagi melalui proses *cool upgrading*.

Pengadaan tanah yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara diperuntukkan dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan bukan diperuntukkan untuk kepentingan umum sehingga tata cara perolehan tanahnya berbeda dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Terkait dengan ketentuan tata cara pengadaan tanah dalam kasus ini kita bisa melihat Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang

⁷ *Ibid.*

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, menyatakan bahwa “Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam proses pengadaan lahan untuk lokasi pertambangan maka dapat dilakukan cara selain yang telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, yaitu cara-cara yang disepakati oleh masyarakat. Dalam hal ini sangat diperlukan peran lembaga pemerintah untuk mengatur kepada siapa saja hak atas tanah ini bisa diberikan sesuai dengan dengan kewenangan hak menguasai dari negara yang diatur dalam Pasal 2 UUPA. Pemerintah hendaknya membantu masyarakat dalam menetapkan ganti rugi yang bisa mereka dapatkan karena dalam hal ini ketika terjadi penyerahan tanah oleh masyarakat terhadap tanah yang telah diserahkan akan terdapat beberapa kerugian disamping juga kondisi lingkungan yang berada di area sekitar pertambangan contohnya mutu tanah akan berkurang akibat proses eksplorasi pertambangan.

Pemerintah dalam menetapkan lahan untuk pertambangan harus sesuai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang sekarang diatur juga dengan PP No.32 Tahun 2013 Tentang Tatacara pemberian izin khusus di Bidang Pertambangan mineral dan batubara dan Peraturan Menteri No.37 Tahun 2013 Tentang Kriteria khusus kawasan untuk pertambangan.

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah: Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain Pemerintah, Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati dengan Pemerintah guna pelaksanaan

pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.

4. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT DI AREA PERTAMBANGAN

Dalam aktivitas pertambangan, ada beberapa isu pokok yang umum diketahui, terkait dengan:

- a. Penurunan tingkat kesuburan tanah
- b. Peningkatan intensitas kebisingan
- c. Penurunan kualitas udara
- d. Daerah resapan dan kualitas air
- e. Getaran yang bersifat lokal, dan isu pokok lainnya

Beberapa hal diatas menjadi pokok perhatian terkait perlindungan hukum, khususnya bagi masyarakat di area pertambangan. Sebagai wujud pemenuhan aspek penambangan yang baik dan benar, maka PT Bukit Asam telah melakukan beberapa tahap penataan atau proses perizinan guna menciptakan kepastian hukum bagi semua stake holder yang terlibat dalam proses tambang atau menjadi pihak terkait dengan adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Bukit Asam, meliputi:

- a. Perizinan lingkungan; dokumen AMDAL penambangan Batubara daerah Peranap kabupaten Indragiri Hulu No. 1758/28/SJN-R/2001 tertanggal 04 Mei 2001, yang telah di setujui Menteri Pertambangan dan Energi.
- b. Pengendalian pencemaran air yang dilakukan secara konprehensif melalui tindakan pencegahan di area timbunan, pengelolaan pasif dengan pemanfaatan area lahan basah.
- c. Pengendalian pencemaran udara, melalui penyiraman jalan-jalan untuk mengurangi polusi debu.
- d. Pengelolaan limbah , dan lain-lain

Keberadaan PT Bukit Asam sebagai perusahaan tambang tentu memiliki tujuan, visi, dan misi perusahaan yang di selaraskan dengan program pemerintah di bidang pertambangan bahan galian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan, maka ditetapkan VISI jangka panjang CSR PT Bukit Asam kedepan yaitu “ mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Dalam mewujudkan VISI ini maka ditetapkan beberapa MISI yang meliputi:

- a. Mendukung program pemerintah untuk meningkatkan taraf ekonomi, sosial, pendidikan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.
- b. Memberdayakan potensi lokal dan memperluas pasar guna perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar perusahaan.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung rencana jangka panjang perusahaan dan pengembangan lokasi pasca tambang.

Dalam *press release* nya Hananto Budi Laksono (24 April 2012)⁸, *Corporate Secretary* PT Bukit Asam menyatakan, dengan dimulainya operasi penambangan di Peranap, maka PT Bukit Asam akan memberikan kontribusi yang maksimal bagi pemerintah kabupaten Indragiri Hulu, kecamatan Peranap baik itu berupa pajak, royalti, dan retribusi. Sedangkan bagi masyarakat Ring I atau masyarakat yang keberadaannya secara langsung bersentuhan dengan kegiatan operasional penambangan mendapatkan kontribusi langsung melalui program *CSR* (*corporate sosial responsibility*). Disamping itu, *multiplier effect* atau dampak ikutannya seperti penyediaan lapangan kerja, peluang usaha, dan berbagai aktivitas perekonomian lainnya jelas merupakan kontribusi yang sangat positif bagi masyarakat sekitar. Untuk itu semua maka PTBA dengan dukungan pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar akan berupaya keras agar semua ini bisa terwujud.

⁸ www.ptba.co.id, di akses Rabu 5 November 2014

Pasca tambang PT Bukit Asam memiliki komitmen yang tinggi dalam menciptakan prinsip bahwa Reklamasi adalah investasi untuk pemanfaatan lahan bekas tambangan artinya perusahaan akan menerapkan pola implementasi penanganan lingkungan sedini mungkin, bahkan ketika kegiatan penambangan masih berlangsung guna tetap menjaga dampak kerusakan.

PT Bukit Asam telah menetapkan Pra Rencana terkait penataan lingkungan, agar lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat daerah tambang. Kegiatan penataan itu meliputi, **Pertama;** Melakukan reklamasi terhadap lahan bekas tambang yang meliputi, penangana tanah pucuk, penangana erosi, pembuatan kolom pengendap lumpur, pengendalian air asam tambang, dan revegetasi. Reklamsi ini dilaksanakan secara maksimal pada saat lahan terbebas dari aktifitas penambangan. **Kedua;** pembagian kawasan tambang atas beberapa blok, blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok koleksi. Pembagian blok ini di sesuaikan dengan karakteristik lahan yang di cadangkan. Blok perlindungan merupakan wilayah yang memiliki potensi terkait keindahan alam, tumbuhan, satwa dan lainnya, blok ini harus mudah diakses masyarakat sekitar. Blok pemanfaatan menjadi kawasan yang di fungsikan untuk menampung segala pemanfaatan kawasan dan potensinya terkait tujuan ekonomis. Blok koleksi merupakan blok wilayah dengan luas yang memungkinkan untuk koleksi tumbuhan dan satwa.

Terkait perlindungan hukum terhadap hak masyarakat, bahwa setiap perusahaan penambang bahan galian terutama batubara, harus melalui beberapa tahap seleksi atau perizinan sesuai aturan yang berlaku baik secara lokal kedaerahan atau peraturan nasional, hal ini sebagai wujud menciptakan kepastian hukum bagi setia stake holder yang terlibat dalam kegiatan penambangan baik langsung atau tidak langsung. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat meliputi:

- a. Pra Penambangan; masyarakat diberi akses luas terkait negosiasi harga lahan yang akan dilakukan ganti rugi, terhadap lahan masyarakat yang telah diganti rugi, PT Bukit Asam masih memberikan hak mengelola lahan kepada masyarakat sampai batas waktu untuk penambangan dilakukan.
- b. Operasional; terkait segala ketentuan hukum melekat didalamnya, meliputi aspek lingkungan, atau kenyamanan masyarakat terhadap tingkat kebisingan maupun getaran tinggi akibat ekses penambangan.
- c. Pasca penambangan; hal ini terkait reklamasi setelah penambangan berakhir sesuai izin yang berlaku.

PTBA menjalankan 2 program utama sebagai wujud tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang lingkungan hidup, yakni Pengelolaan Lingkungan, dan Pemantauan Lingkungan. Khusus untuk jaminan pengelolaan lingkungan, baik pada saat penambangan maupun pasca penambangan, PTBA akan melaksanakan program sebagaimana yang telah dijalankan di dua unit penambangan lainnya seperti Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan Ombilin, Sumatera Barat. Atas program selama ini PTBA telah meraih beberapa penghargaan, diantaranya PROPER HIJAU dari propinsi sebanyak 4 kali, dan dari pemerintah pusat sebanyak 3 kali, serta penghargaan ADITAMA dari kementerian ESDM dalam hal pengelolaan lingkungan. Program ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mencakup, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan diberlakukan setiap area yang menjadi lahan eksploitasi PTBA, baik di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, maupun di Peranap Indragiri Hulu (Riau), khusus untuk Peranap kegiatan pengelolaan lingkungan belum maksimal dilakukan mengingat aktivitas penambangan belum berjalan seratus persen, mengingat bahan galian yang akan di eksploitasi belum menunjukkan kadar yang layak, namun demikian tahapan

kegiatan pengelolaan lingkungan tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan maupun aturan teknis perusahaan.⁹

Untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan, setiap tahun Perusahaan menetapkan parameter indikator sasaran lingkungan sesuai aturan yang berlaku di bidang pertambangan dan aturan dari pemerintah setempat untuk baku mutu lingkungan.¹⁰ Berikut beberapa indikator pelaksanaan program pengelolaan lingkungan yang menjadi standar perusahaan:¹¹

- 1) Pemantauan terhadap luas lahan terubah .
- 2) Pembukaan lahan dan reklamasi lahan bekas tambang sesuai aturan yang berlaku.
- 3) Pemeliharaan tanaman.
- 4) Pembuatan kolam pengendap lumpur.
- 5) Pengurusan lumpur kolam pengendap.
- 6) Pembibitan dan penanaman.
- 7) Pengelolaan tanah pucuk.
- 8) Penanggulangan air asam tambang.
- 9) Penanggulagn erosi.
- 10) Penanganan limbah B3.
- 11) Emisi
- 12) Program kemitraan dan bina lingkungan

Terkait tanggung jawab terhadap lingkungan, PTBA melakukan pemantauan secara rutin terkait dengan:¹²

- 1) Kualitas air; dilakukan di 40 titik pantau, setaiiap 2 bulan sekali
- 2) Kualitas udara; dilakukan di 11 titik pantau, setiap sebulan
- 3) Emisi udara; di 7 titik, setiap triwulan
- 4) Kualitas tanah; di 7 titik pantau, sebanyak 2x setahun
- 5) Erosi; di 6 titik pantau, setiap triwulan
- 6) Satwa liar; di 6 titik pantau, sebanyak 2x setahun
- 7) Sosial ekonomi dan budaya, setaiiap tahun

⁹ Wawancara dengan Bapak Anggiat. S, Kepala Proyek PTBA wilayah Peranap – INHU, Senin, 27 Oktober 2014.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Wawancara dengan Bapak Zul Azhar, Staf Humas, Proyek PTBA wilayah Peranap – INHU Selasa, 28 Oktober 2014.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat di sekitar area penambangan khususnya di Peranap - INHU, maka sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, ada beberapa hal yang dilakukan oleh PTBA, diantaranya:¹³

- a. Kontribusi maksimal terhadap pemerintah setempat terkait, Royalti, Pajak, dan Retribusi lainnya.
- b. Khusus masyarakat Ring I, yang keberadaannya secara langsung bersentuhan dengan kegiatan operasional penambangan mendapatkan kontribusi langsung melalui program *CSR (corporate sosial responsibility)*.
- c. Disamping itu, *multiplier effect* atau dampak ikutannya seperti penyediaan lapangan kerja, peluang usaha, dan berbagai aktivitas perekonomian lainnya jelas merupakan kontribusi yang sangat positif bagi masyarakat sekitar.

Pelaksanaan program CSR ini dilandasi dengan lahirnya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk itu PTBA melaksanakan program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN. Pola kemitraan ini melibatkan masyarakat aktif dalam perencanaan program, pelaksanaan maupun monitoring program, atau terkait program kemitraan yang lain yang akan membawa eksese yang baik bagi kemajuan perekonomian masyarakat dalam lingkup tambang.¹⁴ Adapun beberapa program kemitraan yang telah dilakukan meliputi:¹⁵

- 1) Penyaluran dana kemitraan pada Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
- 2) Program pembinaan UKM dan Koperasi.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

- 3) Pelatihan kewirausahaan.
- 4) Membantu mitra binaan untuk promosi melalui event pameran.
- 5) Bantuan piutang bergulir

Dari program ini PTBA telah merealisasikan dana PKBL sebesar Rp. 145,20 Milyar (tahun 2012), meliputi:¹⁶

- 1) Bantuan bencana alam
- 2) Bantuan pendidikan dan pelatihan
- 3) Bantuan kesehatan masyarakat
- 4) Bantuan sarana dan prasarana umum
- 5) Bantuan sarana ibadah
- 6) Bantuan pelestarian alam

Saat ini kegiatan aktivitas tambang di daerah Peranap dalam kondisi *off operation*, hal ini terkait dengan masih rendahnya kadar mineral atau kalori yang terkandung pada batubara di Peranap yang masih diangka BA 53 (53.000 kilo kalori/gram), sehingga butuh beberapa tahun kedepan agar kadar nya meningkat ke angka normal atau layak tambang sehingga aktivitas tambang dapat dilakukan secara normal ditambah lagi saat ini harga batubara jauh dibawah standar layak operasional, mengingat kadar mineral kalori yang ada di areal tambang Peranap masih memerlukan peningkatan kadar atau *coal upgrading* . Dengan dasar itulah pelaksanaan tanggung jawab sosial PTBA terkait dana CSR belum maksimal dilakukan, karena dasar tanggung jawab itu tergantung tingkat penghasilan atau pendapatan perusahaan. Sungguh pun demikian PTBA tetap membuka komunikasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat terkait hal-hal yang dapat di sinergikan demi kemajuan ekonomi masyarakat secara umum. Untuk itu pula PTBA masih memberi izin bagi masyarakat yang lahan nya telah di ganti rugi untuk tetap diolah dan dimanfaatkan hasilnya bagi masyarakat sampai

¹⁶ *Ibid.*

aktivitas tambang normal beroperasi.¹⁷ Adapun pasca dikeluarkannya izin kuasa tambang baik IUP Eksploitasi maupun IUP Operasi Produksi, maka sejak tahun 2010 PTBA telah melakukan beberapa agenda kegiatan di areal tambang batubara Peranap terkait persiapan proses penambangan yang akan dilakukan kedepan, meliputi:

1. Eksplorasi:
 - a) Ekplorasi di 193 lubang bor dengan total kedalaman 20.896 meter
 - b) Pemetaan topografi rinci skala 1:2000, dan 1:5000, seluas areal 18.230 hektare
 - c) Pemetaan terestris skala 1:1000, seluas 115 hektare
2. Persiapan Penambangan:
 - a) Pembuatan, perapihan dan perawatan jalan sepanjang 2,5 KM
 - b) Penentuan *boundary* tambang
 - c) *Land Clearing* seluas 15 Hektare
 - d) Persiapan alat berat, 1 *bulldozer*, 1 *excavator*, dan 2 *dump truck*
 - e) Tenaga kerja sebanyak 20 orang
3. Penyiapan program K3L untuk operasi penambangan selanjutnya.

E. Penutup

1. Kesimpulan
 - a. Proses penambangan batubara di Peranap Indragiri Hulu diawali dengan adanya survei kelayakan yang dilakukan oleh LPM ITB tahun 1999, terkait kandungan batubara di areal Semelinang Tebing daerah Peranap, dengan perkiraan luas 18.230 Ha, dengan total cadangan batubara sebesar 792 juta ton, yang dapat diproduksi selama 40 tahun kedepan. Atas dasar itulah pemerintah mengeluarkan dokumen AMDAL, dan IUP utk eksploitasi dan operasi produksi, kepada PTBA sebagai penerima kuasa untuk

¹⁷ *Ibid*

melakukan penambangan di areal tambang Peranap. Dari total areal seluas 18.230 Ha yang masuk dalam areal tambang, baru sekitar 400 Ha lahan yang sudah dilakukan kompensasi ganti rugi kepada masyarakat serta dilakukan proses peralihan hak kepada PTBA selaku pemilik lahan yang baru. Sisa lahan yang belum ditetapkan ganti rugi kepada masyarakat, PTBA bersama pemerintah setempat, dan pemilik lahan terus mengupayakan jalan mediasi demi tercapainya tujuan bersama menuju kesejahteraan bagi setiap *stake holder* yang terkait dengan aktivitas tambang di areal tambang Peranap.

- b. Sebagai wujud tanggung jawab dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sekitar tambang, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mencakup, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan hidup, dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN, PT Bukit Asam memiliki tanggung jawab sosial terkait dengan masyarakat sekitar tambang melalui program CSR maupun terhadap eksekusi tambang yakni lingkungan hidup melalui program kemitraan bina lingkungan, sebagai wujud kepedulian perusahaan untuk membantu program pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat sekitar tambang.

2. Saran

- a. Dalam proses penyediaan lahan maupun proses gantirugi hendaknya dilakukan dengan transparan dan adil, sehingga dapat mengakomodir setiap perasaan keadilan warga masyarakat sekitar tambang sehingga proses peralihan hak atas lahan dapat berjalan lancar.

- b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan aspek keberimbangan, prioiritas, dan menyentuh nilai adil masyarkat, sehingga program CSR yang dilakukan jangan seolah pelepas beban tanggung jawab perusahaan, melainkan hendaknya mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

E. Daftar Pustaka

1. Buku-buku :

- Adrian Sutedi, *Pengalihan hak atas tanah dan pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- AP. Parlindungan, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Alumni, 1986
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi-jilid 1, Jakarta: Djambatan, 2005
- Effendy Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Emrizal Akbar, dkk, *Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat*, LPNU Press, Pekanbaru, 2005
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi daerah, menjaga kesatuan bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Gunawan Widjaja dan Kartini Widjaja, *Jual beli*, Rajawalipersada, Jakarta, 2003
- G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Tanah, Jaminan bagi Keberhasilan Pendaayagunaan Tanah*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991
- Kurnia Warman, *Hukum Agraria dalam masyarakat Majemuk*, Jakarta, 2012
- Yahya Harahap, *Segi-segi hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

Ulfia Hasanah

VOLUME 6 NO. 1, Agustus 2015-Januari 2016

JURNAL ILMU HUKUM

Salim, HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2012.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995

3. Peraturan Perundang-undangan:

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang- Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Website :

[www.Indolaw center.com](http://www.Indolawcenter.com)

[www, diskopumkm.inhukab.go.id](http://www.diskopumkm.inhukab.go.id)

[www, psdg.dgl.esdm.go.id](http://www,psdg.dgl.esdm.go.id)

www.PTBA.go.id